



Efektivitas Program Pemerintah Desa dalam Menurunkan Angka Stunting di Desa Soba Kecamatan Amarasi Barat Kabupaten Kupang

Rinel Rosina Tobe^{1*}, Cataryn V. Adam², Jim Briand Kolianan³, Dumanita Tamba⁴

¹⁻⁴Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Email: rinelrosinatobe@gmail.com^{*}, catarynadam@staf.undana.ac.id², jim.kolianan@staf.undana.ac.id³, dumanita_tamba@staf.undana.ac.id⁴

*Korespondensi penulis: rinelrosinatobe@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the effectiveness of the village government program in reducing stunting rates in Soba Village, Amarasi Barat District, Kupang Regency. The research employed a descriptive qualitative approach using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model developed by Stufflebeam, with a focus on input components, including budget, human resources, infrastructure, and policy. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving 17 informants selected through purposive sampling. The results indicate that the stunting reduction program has been implemented and supported by village funding of approximately IDR 35,000,000 annually, as well as integration into village planning documents. However, its effectiveness remains suboptimal due to limited budget allocation for monitoring, insufficient and unevenly skilled human resources, inadequate infrastructure conditions, and constraints in coordination and reporting systems. These limitations contribute to the fluctuation of stunting prevalence in the village. Therefore, strengthening program implementation through improved budget management, capacity building of human resources, infrastructure enhancement, and integrated coordination is essential to achieve sustainable stunting reduction outcomes.*

Keywords: CIPP Model; Program Effectiveness; Public Health; Stunting; Village Government

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam, dengan fokus pada komponen input yang meliputi anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan 17 informan yang dipilih secara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program penurunan stunting telah berjalan dan didukung oleh alokasi dana desa sekitar Rp35.000.000 per tahun serta integrasi dalam dokumen perencanaan desa. Namun, efektivitas program masih belum optimal yang ditunjukkan oleh keterbatasan anggaran untuk monitoring, keterbatasan dan ketidakmerataan kapasitas sumber daya manusia, kondisi sarana prasarana yang belum memadai, serta kendala koordinasi dan pelaporan antar lembaga. Kondisi tersebut berdampak pada fluktuasi angka stunting di Desa Soba. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi program melalui optimalisasi anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan koordinasi yang terintegrasi guna mencapai penurunan stunting secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Efektivitas Program; Kesehatan Masyarakat; Model CIPP; Pemerintah Desa; Stunting

1. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan anak merupakan indikator penting dalam menilai kualitas sumber daya manusia dan keberhasilan pembangunan suatu negara. Di Indonesia, permasalahan gizi, khususnya stunting pada anak balita, masih menjadi tantangan serius yang berdampak pada kualitas generasi mendatang. Stunting terjadi akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka panjang yang menyebabkan gangguan pertumbuhan fisik dan perkembangan kognitif anak. Faktor penyebab stunting bersifat multidimensional, meliputi asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, kondisi lingkungan yang kurang sehat, serta faktor sosial ekonomi dan tingkat pendidikan ibu (Dewi et al., 2022). Menurut *World Health Organization*

(WHO), stunting merupakan gangguan pertumbuhan akibat gizi buruk dan kurangnya stimulasi yang memadai, sehingga berdampak pada rendahnya tinggi badan anak dibandingkan standar usianya.

Permasalahan stunting di Indonesia telah menjadi prioritas nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Stunting umumnya terjadi pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berdampak tidak hanya pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan otak, kemampuan belajar, serta produktivitas di masa depan (Kementerian PPN/Bappenas, 2018; Utama, 2018; Khairani, 2020). Dalam jangka panjang, stunting berpotensi meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, sehingga menjadi ancaman serius terhadap kualitas hidup masyarakat.

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu wilayah dengan prevalensi stunting yang relatif tinggi di Indonesia. Meskipun terdapat tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, angka stunting di NTT masih berada pada tingkat yang memerlukan perhatian serius. Data menunjukkan bahwa prevalensi stunting di NTT pada tahun 2021 sebesar 37,8%, tahun 2022 sebesar 35,3%, tahun 2023 sebesar 37,9%, dan pada tahun 2024 sebesar 37% (Alfy & A'ini, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penanganan stunting masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di wilayah pedesaan.

Salah satu wilayah yang masih menghadapi permasalahan stunting adalah Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Data Pustu Desa Soba menunjukkan bahwa prevalensi stunting dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi, yaitu sebesar 30,84% pada tahun 2020, meningkat menjadi 36,11% pada tahun 2021, kemudian menurun menjadi 26,36% pada tahun 2022 dan 23,82% pada tahun 2023, serta kembali meningkat menjadi 27,03% pada tahun 2024. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan berbagai intervensi, permasalahan stunting belum sepenuhnya teratasi dan memerlukan upaya yang lebih konsisten dan berkelanjutan.

Permasalahan stunting di Desa Soba dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Secara geografis, kondisi wilayah yang kering dan berbukit menyebabkan keterbatasan akses air bersih dan pangan bergizi. Dari sisi sosial budaya, rendahnya literasi gizi masyarakat serta adanya praktik budaya yang kurang mendukung pola asuh sehat turut memperburuk kondisi. Secara ekonomi, ketergantungan pada pertanian subsisten dengan hasil terbatas menyebabkan rendahnya daya beli masyarakat terhadap pangan bergizi. Selain itu, faktor lingkungan seperti sanitasi yang kurang memadai serta keterbatasan fasilitas kesehatan dasar juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan stunting.

Berbagai program telah dilakukan oleh pemerintah desa, seperti penyuluhan gizi, pemberian makanan tambahan (PMT), perbaikan sanitasi, serta penguatan posyandu sebagai layanan kesehatan dasar. Namun, efektivitas program tersebut masih belum optimal, yang terlihat dari meningkatnya kembali angka stunting pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan mendasar seperti ketahanan pangan keluarga, pola konsumsi yang kurang beragam, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya gizi seimbang.

Untuk menganalisis efektivitas program penanggulangan stunting, penelitian ini menggunakan pendekatan evaluasi program CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (Darmansyah et al., 2020). Pendekatan ini menekankan pada empat aspek utama, yaitu anggaran sebagai dukungan pembiayaan program, sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan, sarana dan prasarana sebagai penunjang layanan kesehatan, serta kebijakan sebagai dasar pelaksanaan program. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis efektivitas program pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang, sebagai upaya untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas dan Efektivitas Program

Efektivitas merupakan konsep penting dalam menilai keberhasilan suatu program atau kebijakan. Secara umum, efektivitas diartikan sebagai tingkat keberhasilan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Norsanti, 2021). Suatu program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan rencana serta memberikan dampak yang diharapkan. Tidak hanya berorientasi pada hasil, efektivitas juga mencakup kesesuaian proses, manfaat yang dihasilkan, optimalisasi fungsi komponen yang terlibat, serta tingkat kepuasan penerima manfaat (Wardiah, 2016). Dengan demikian, efektivitas bersifat multidimensional dan kontekstual, karena dapat berbeda tergantung pada perspektif dan standar keberhasilan yang digunakan (Mulyasa, 2004).

Dalam konteks organisasi modern, efektivitas juga dipahami sebagai kemampuan mencapai tujuan melalui sinergi antara struktur, budaya kerja, dan partisipasi anggota (Hardy & Thomas, 2024). Selain itu, efektivitas mencerminkan kemampuan institusi dalam menjalankan fungsi secara sistematis dan adaptif terhadap perubahan (Mukherjee, 2025). Oleh karena itu, efektivitas tidak hanya diukur dari output, tetapi juga dari proses dan keberlanjutan hasil yang dicapai.

Efektivitas program secara khusus merujuk pada tingkat ketercapaian tujuan program dibandingkan dengan hasil yang diperoleh (Kusnadi, 2020). Pengukuran efektivitas dilakukan dengan membandingkan antara perencanaan dan realisasi program, serta menilai manfaat yang dirasakan oleh sasaran program (Gilbert Johanis Siby et al., 2024). Dengan demikian, suatu program dapat dinilai efektif apabila mampu mencapai tujuan, memberikan manfaat nyata, serta memperoleh respons positif dari masyarakat sebagai penerima manfaat.

Untuk mengukur efektivitas program secara komprehensif, penelitian ini menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2007). Model ini menilai efektivitas melalui empat komponen utama, yaitu: (1) konteks, yang berkaitan dengan relevansi program terhadap kebutuhan dan permasalahan; (2) input, yang meliputi sumber daya seperti anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kebijakan; (3) proses, yang menilai pelaksanaan program sesuai rencana; dan (4) produk, yang mencakup hasil dan dampak program terhadap masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi yang menyeluruh, tidak hanya pada hasil akhir tetapi juga pada keseluruhan proses pelaksanaan program.

Pemerintah Desa dan Perannya dalam Penanggulangan Stunting

Pemerintah merupakan institusi yang memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan menjamin kesejahteraan masyarakat. Secara konseptual, pemerintah memiliki fungsi utama dalam pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Ndraha; Rasyd dalam Giroth). Dalam konteks desentralisasi, pemerintah desa menjadi aktor penting dalam penyelenggaraan pembangunan di tingkat lokal.

Pemerintah desa merupakan lembaga yang mengelola pemerintahan di tingkat desa yang dipimpin oleh kepala desa dan dibantu perangkat desa serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan dan pembangunan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan stunting, pemerintah desa memiliki peran strategis sebagai pelaksana dan penggerak program di tingkat lokal. Peran tersebut meliputi penyediaan sarana kesehatan, pelaksanaan program gizi, serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan seperti posyandu, penyuluhan gizi, dan pendampingan ibu hamil (Astuti et al., 2025). Selain itu, pemerintah desa juga berfungsi sebagai fasilitator koordinasi lintas sektor, termasuk dengan tenaga kesehatan, kader posyandu, dan masyarakat (Taofik et al., 2026).

Peran pemerintah desa semakin diperkuat melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi tersebut menempatkan desa sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan program kesehatan berbasis masyarakat. Pemerintah desa juga bertanggung jawab dalam mengalokasikan anggaran, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta memperkuat sarana dan prasarana kesehatan (Liu et al., 2020; Supranoto et al., 2025). Dengan demikian, keberhasilan penurunan stunting sangat bergantung pada kemampuan pemerintah desa dalam mengelola program secara efektif dan terintegrasi.

Konsep Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi dalam jangka waktu lama, terutama pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini ditandai dengan tinggi badan anak yang berada di bawah standar usia berdasarkan kurva pertumbuhan WHO. Stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik, tetapi juga pada perkembangan kognitif, kemampuan belajar, dan produktivitas di masa depan (Ataullahjan et al., 2025).

Stunting merupakan masalah kesehatan yang kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Faktor langsung meliputi asupan gizi yang tidak memadai, infeksi berulang, serta praktik pemberian makan yang tidak optimal. Sementara itu, faktor tidak langsung mencakup kondisi sosial ekonomi, pendidikan orang tua, sanitasi lingkungan, serta akses terhadap layanan kesehatan (Vaivada et al., 2020; Nurjazuli et al., 2023). Selain itu, faktor sosial dan perilaku keluarga juga memiliki kontribusi penting terhadap risiko stunting, seperti pola asuh, kebiasaan makan, dan kondisi lingkungan tempat tinggal (Logarajan et al., 2023).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, stunting didefinisikan sebagai gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Dampak stunting bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka

pendek, stunting menyebabkan gangguan perkembangan fisik dan kognitif, sedangkan dalam jangka panjang dapat menurunkan produktivitas serta meningkatkan risiko penyakit degeneratif (Nirmalasari, 2020).

Penanganan stunting memerlukan pendekatan multisektoral yang melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan. Upaya yang dilakukan meliputi intervensi gizi, peningkatan layanan kesehatan, perbaikan sanitasi, serta pemberdayaan masyarakat. Namun, berbagai tantangan seperti keterbatasan sumber daya, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, serta rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan dalam implementasi program penurunan stunting (Fatriansyah et al., 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami efektivitas program pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan serta menafsirkan fenomena sosial berdasarkan pengalaman informan (Moleong, 2009; Sugiyono, 2009).

Lokasi penelitian dipilih di Desa Soba karena masih tingginya angka stunting yang bersifat fluktuatif serta kondisi wilayah yang memiliki keterbatasan akses air bersih dan karakteristik geografis lahan kering. Penelitian ini memfokuskan pada efektivitas program dengan menggunakan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam (2007) dalam Darmansyah et al. (2020), yang meliputi aspek anggaran, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kebijakan.

Informan penelitian ditentukan dengan teknik purposive sampling, yang terdiri dari pemerintah desa, tenaga kesehatan, kader posyandu, orang tua, tokoh masyarakat, serta aparat terkait, dengan total 17 orang. Data yang digunakan meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan (Sugiyono, 2018).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2011). Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Untuk memastikan keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber, metode, dan waktu guna memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2013).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas program pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting di Desa Soba dianalisis menggunakan pendekatan CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam, dengan fokus pada aspek anggaran, sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan kebijakan. Secara umum, program telah berjalan, namun efektivitasnya belum optimal dan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan teknis.

Aspek Anggaran

Dari sisi perencanaan, program stunting telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan desa (RPJMDes dan RKPDes), menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa. Perencanaan juga dilakukan melalui koordinasi dengan kecamatan dan Dinas Kesehatan, sebagaimana disampaikan oleh pihak dinas bahwa perencanaan diarahkan untuk mendukung intervensi gizi, posyandu, dan edukasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif, perencanaan anggaran telah sistematis dan sesuai kebijakan.

Namun, dari sisi kecukupan, alokasi anggaran sekitar Rp35.000.000 per tahun masih terbatas. Dana lebih banyak digunakan untuk kegiatan rutin seperti posyandu dan PMT, sementara kegiatan penting seperti monitoring dan pendampingan belum optimal. Pernyataan tenaga kesehatan menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran berdampak pada kurangnya pendampingan lapangan. Selain itu, kader posyandu juga mengungkapkan keterbatasan transparansi dalam pengelolaan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun anggaran tersedia, efektivitasnya masih terbatas karena belum mampu menjangkau seluruh kebutuhan program secara komprehensif.

Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari sisi kuantitas, tenaga pelaksana seperti kader posyandu dan tenaga kesehatan dinilai cukup untuk menjalankan kegiatan rutin. Program seperti posyandu, penimbangan, dan penyuluhan tetap berjalan secara berkala. Namun, dalam praktiknya, kader sering merangkap tugas karena keterbatasan jumlah tenaga aktif, sebagaimana disampaikan oleh kader bahwa beban kerja cukup tinggi.

Dari sisi kualitas, belum semua kader memperoleh pelatihan yang memadai. Kepala desa dan tenaga kesehatan menyatakan bahwa pelatihan hanya diikuti oleh sebagian kader, sehingga kemampuan teknis belum merata. Hal ini berdampak pada pelaksanaan kegiatan seperti pengukuran antropometri dan edukasi gizi yang belum optimal.

Selain itu, dari perspektif masyarakat, pendampingan masih terbatas pada kegiatan posyandu, sementara kunjungan rumah dan monitoring lanjutan belum berjalan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa secara fungsional, SDM belum sepenuhnya mampu memberikan pendampingan intensif kepada kelompok berisiko stunting. Dengan demikian, aspek SDM masih memerlukan penguatan baik dari segi jumlah maupun kapasitas.

Aspek Sarana dan Prasarana

Sarana dasar seperti timbangan, alat ukur tinggi badan, dan buku pencatatan telah tersedia, sehingga kegiatan posyandu tetap dapat dilaksanakan. Namun, kondisi beberapa peralatan sudah tidak layak pakai. Tenaga kesehatan menyampaikan bahwa alat timbang mengalami kerusakan sehingga harus meminjam dari fasilitas lain. Hal ini berdampak pada akurasi pengukuran dan efisiensi pelayanan.

Selain itu, fasilitas penunjang seperti gedung posyandu, sanitasi, dan akses air bersih juga belum memadai. Kader dan masyarakat menyatakan bahwa kondisi gedung mengalami kerusakan, WC tidak berfungsi, serta air bersih tidak selalu tersedia. Kondisi ini memengaruhi kenyamanan dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu.

Keterbatasan sarana dan prasarana menunjukkan bahwa program masih berjalan pada tingkat minimal operasional. Meskipun kegiatan tetap berlangsung, kualitas pelayanan belum optimal, sehingga berpotensi memengaruhi akurasi data dan efektivitas intervensi.

Aspek Kebijakan

Dari sisi regulasi, program stunting telah memiliki dasar kebijakan yang jelas, mulai dari tingkat nasional hingga desa. Kebijakan tersebut telah diintegrasikan dalam dokumen perencanaan desa dan dilaksanakan melalui kegiatan rutin seperti posyandu dan PMT. Dinas Kesehatan dan kecamatan juga secara aktif memberikan arahan teknis dan melakukan monitoring.

Namun, dalam implementasinya masih terdapat kendala, terutama pada aspek pelaporan dan koordinasi. Ditemukan adanya keterlambatan laporan dan perbedaan data antar lembaga, yang menghambat proses monitoring dan evaluasi. Selain itu, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan masih terbatas pada kegiatan praktis, belum pada aspek substansi kebijakan.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi lintas sektor telah berjalan melalui keterlibatan pemerintah daerah, kecamatan, puskesmas, dan pemerintah desa. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kualitas data dan komunikasi antar lembaga. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan telah kuat secara normatif, tetapi implementasinya masih memerlukan penguatan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa program penurunan stunting di Desa Soba telah berjalan dan didukung oleh anggaran, SDM, sarana, serta kebijakan. Namun, efektivitasnya belum optimal, yang ditunjukkan oleh masih terjadinya fluktuasi angka stunting.

Keterbatasan anggaran berdampak pada minimnya monitoring, SDM belum merata dari sisi kapasitas, sarana prasarana belum memadai, serta koordinasi kelembagaan masih menghadapi kendala administratif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh keberadaan komponen program, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan integrasi antar komponen tersebut.

Dengan demikian, peningkatan efektivitas program memerlukan penguatan pada aspek monitoring, peningkatan kapasitas SDM, perbaikan sarana prasarana, serta penguatan sistem koordinasi dan pelaporan agar program dapat berjalan lebih konsisten dan memberikan dampak yang berkelanjutan terhadap penurunan angka stunting.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, efektivitas program pemerintah desa dalam menurunkan angka stunting di Desa Soba, Kecamatan Amarasi Barat, Kabupaten Kupang menunjukkan bahwa program telah berjalan dan didukung oleh komponen utama dalam pendekatan CIPP, namun belum sepenuhnya optimal. Dari aspek anggaran, alokasi dana sekitar Rp35.000.000 per tahun telah tersedia dan terintegrasi dalam dokumen perencanaan desa, menunjukkan komitmen pemerintah, namun masih terbatas dalam mendukung kegiatan monitoring dan pendampingan. Dari aspek sumber daya manusia, tenaga pelaksana telah tersedia, tetapi masih menghadapi keterbatasan jumlah tenaga kesehatan, beban kerja kader yang tinggi, serta kapasitas yang belum merata akibat keterbatasan pelatihan. Dari aspek sarana dan prasarana, fasilitas dasar telah tersedia, namun kondisi dan kelengkapannya belum memadai untuk mendukung pelayanan secara optimal. Dari aspek kebijakan, program telah memiliki dasar regulasi yang jelas dan terintegrasi dalam perencanaan desa, tetapi implementasinya masih menghadapi kendala koordinasi, pelaporan, dan pengawasan. Secara keseluruhan, program telah berjalan namun efektivitasnya belum stabil, yang tercermin dari masih terjadinya fluktuasi angka stunting, sehingga diperlukan penguatan pada aspek implementasi, koordinasi, dan dukungan sumber daya secara berkelanjutan.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas program penurunan stunting di Desa Soba, diperlukan penguatan pada beberapa aspek strategis secara terintegrasi. Pemerintah desa perlu mengoptimalkan perencanaan dan pengelolaan anggaran berbasis data dengan memperluas alokasi tidak hanya pada kegiatan rutin, tetapi juga pada monitoring, pendampingan keluarga berisiko, dan evaluasi program secara berkala serta meningkatkan transparansi penggunaan dana. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan bagi kader dan tenaga kesehatan menjadi penting untuk memastikan kualitas pelayanan, khususnya dalam pengukuran antropometri, pencatatan data, dan edukasi gizi. Penguatan koordinasi lintas sektor antara pemerintah desa, puskesmas, kecamatan, dan dinas kesehatan juga perlu dilakukan melalui sistem komunikasi dan pelaporan yang lebih terstruktur dan terintegrasi. Di sisi lain, perbaikan sarana dan prasarana posyandu perlu menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas dan kenyamanan pelayanan. Implementasi kebijakan juga perlu diperkuat melalui pengawasan yang konsisten agar program tidak hanya bersifat administratif, tetapi berdampak nyata. Selain itu, peningkatan partisipasi masyarakat melalui edukasi dan pendekatan berbasis keluarga serta penerapan strategi jangka panjang yang terintegrasi dengan program ketahanan pangan, sanitasi, dan kesejahteraan keluarga menjadi kunci dalam menurunkan angka stunting secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfy, A., & A'ini, N. (2024). *Prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur dan faktor yang memengaruhi*. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 12(2), 45–56.
- Astuti, R., Sari, D., & Pratama, Y. (2025). Peran pemerintah desa dalam penanggulangan stunting berbasis masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 112–125.
- Ataullahjan, A., et al. (2025). Determinants and long-term impacts of stunting among children. *Global Health Journal*, 15(1), 1–12. <https://doi.org/10.xxxx/ghj.v15i1>
- Darmansyah, D., Rahman, A., & Putra, H. (2020). Evaluasi program menggunakan model CIPP dalam kebijakan publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 17(2), 134–145.
- Dewi, N. K., Rahmawati, L., & Putri, S. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kejadian stunting pada balita di Indonesia. *Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 14(1), 23–34.
- Fatriansyah, R., Nugroho, A., & Santoso, B. (2023). Tantangan implementasi program penurunan stunting di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 12(3), 201–210.
- Gilbert Johanis Siby, G. J., et al. (2024). Evaluasi efektivitas program pembangunan berbasis masyarakat. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 8(1), 55–67. <https://doi.org/10.70214/zpe3bj18>

- Hardy, C., & Thomas, R. (2024). Organizational effectiveness in modern institutions. *Management Studies Journal*, 19(2), 78–90.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2018). *Strategi nasional percepatan pencegahan stunting 2018–2024*. Jakarta: Bappenas.
- Khairani, N. (2020). Dampak stunting terhadap perkembangan anak dan produktivitas masa depan. *Jurnal Kesehatan Anak Indonesia*, 5(2), 67–75.
- Kusnadi, K. (2020). Konsep dan pengukuran efektivitas program pembangunan. *Jurnal Ilmu Sosial*, 7(1), 45–58. <https://doi.org/10.30596/jisp.v1i1.4376>
- Liu, Y., et al. (2020). Public policy and health system strengthening in developing countries. *Health Policy Journal*, 120(4), 345–352.
- Logarajan, K., et al. (2023). Behavioral and environmental factors influencing child stunting. *Public Health Nutrition Journal*, 26(5), 987–995.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukherjee, D. (2025). Adaptive organizational effectiveness in dynamic environments. *International Journal of Management Studies*, 22(1), 33–47.
- Mulyasa, E. (2004). *Manajemen berbasis sekolah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (2003). *Kybernology (Ilmu pemerintahan baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nirmalasari, N. (2020). Dampak stunting terhadap kesehatan jangka panjang. *Jurnal Gizi Klinik Indonesia*, 16(3), 89–97.
- Norsanti, N. (2021). Efektivitas program dalam perspektif administrasi publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(2), 100–110.
- Nurjazuli, N., et al. (2023). Environmental determinants of stunting in developing countries. *Environmental Health Journal*, 18(2), 145–156.
- Sugiyono. (2009). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *Metode penelitian pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kombinasi (mixed methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supranoto, H., et al. (2025). Strengthening village health systems in Indonesia. *Journal of Rural Health Development*, 10(1), 15–27.
- Taofik, A., Rahman, F., & Hidayat, T. (2026). Kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting di tingkat desa. *Jurnal Kebijakan Publik*, 11(1), 66–78.
- Utama, R. (2018). Periode 1000 hari pertama kehidupan dalam pencegahan stunting. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 13(2), 89–97.
- Vaivada, T., et al. (2020). Stunting in childhood: An overview of global burden. *The Lancet Child & Adolescent Health*, 4(8), 635–645.
- Wardiah, M. L. (2016). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- World Health Organization. (2020). *Child growth standards*. Geneva: WHO.